



Judul : Mau Tambah Anggaran : Kemendes PDTT Diwajibkan Punya Program Unggulan
Tanggal : Minggu, 23 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Mau Tambah Anggaran Kemendes PDTT Diwajibkan Punya Program Unggulan

ANGGOTA Komisi V DPR Fadholi berharap ada program unggulan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang dapat mendorong kemakmuran desa. Dengan demikian, Kemendes PDTT dapat tampil menjadi tulang punggung untuk kemajuan Indonesia khususnya di pedesaan.

“Kalau desanya makmur, subur, maka Indonesia akan maju. Karena itu, harus ada yang dapat menjadi program unggulan kementerian ini,” kata Fadholi di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Fadholi belum melihat apa yang menjadi program unggulan kementerian yang dipimpin Halim Iskandar ini. Untuk itu, dia usul agar dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka melihat program jangka panjang yang dapat dilakukan Kemendes PDTT.

“Sehingga kalau Komisi V mendukung untuk bisa ada tambahan anggaran, maka kita jelas dan itu *reasonable*. Tapi kalau tidak ada program unggulan yang kemudian bisa meyakinkan semua pihak bahwa bisa memakmurkan Indonesia, ya tidak bisa,” ujarnya.

Politisi Fraksi Nasdem ini meminta Kemendes PDTT memiliki parameter yang jelas terhadap definisi desa makmur. Sebab pihaknya sampai saat ini belum mengetahui sudah berapa banyak desa yang sudah dilakukan pendampingan dan pembinaan lalu mengalami kemajuan signifikan.

“Kalau desa-desa ini dibina tetapi tidak ada prosesnya dan masih sama seperti biasa, lalu apa? Maka itu perlu ada tolok ukur yang jelas terkait dengan pengembangan desa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta dilakukan evaluasi terhadap pendamping desa yang sudah ada. Jika pendamping desa itu dinyatakan tidak layak, sudah sepatutnya diberikan sanksi atau dihentikan. Sebaliknya, jika pendamping tersebut berkinerja baik, maka pantas untuk terus dilanjutkan.

Terlebih, persoalan pendamping desa ini menjadi bahan keluhan dari banyak anggota dewan. Tidak boleh keluhan tersebut hanya ditampung begitu saja. “Perlu keberanian dan ketegasan dari Kemendes untuk hadapi semua persoalan ini. Biar tidak menjadi pemikiran-

pemikiran, prasangka buruk kepada beberapa golongan atau yang lainnya,” tambah dia.

Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw mengeluhkan minimnya tindak lanjut dari Kemendes PDTT terhadap aduan dari masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa. Padahal, aduan masyarakat ini menunjukkan besarnya kepedulian dalam memastikan penggunaan dana desa ini benar-benar dirasakan manfaatnya di masyarakat.

“Mohon jadi perhatian. Jangan cuma karena persoalan yang melapor identitasnya tidak ada, tindak lanjut (pengaduan) jadi tidak jelas,” ujarnya.

Roberth Rouw mengingatkan, persoalan identitas atau laporan anonim tidak boleh menjadi dalih bagi Kemendes PDTT untuk tidak menindaklanjuti aduan masyarakat. Sebab bisa saja, identitas pelaporan menjadi tidak tidak karena pelapor belum memiliki KTP-elektronik.

“Karena itu (identitas) jangan menjadi syarat utama. Tolong kalau ada laporan tentang penyelenggara yang tidak melakukan sesuai aturan, dicek dulu, jangan malah balik mengecek yang melapor. Ini yang selalu terjadi,” tegasnya. ■ KAL